



Asa Kemerdekaan di Balik Batasan Desil

Saat Warga “Terengah-engah” Menanti Keberpihakan

BAGI masyarakat yang telah didatangi petugas Sensus Ekonomi, pasti mendapat berbagai macam pertanyaan. Dari berapa pengeluaran keluarga selama sebulan, hingga masak apa saja untuk makan sehari-hari?

Lalu setelah bertemu dengan rekan, saling bercerita soal Sensus Ekonomi dan melakukan cek status desil di website cekbansos.kemensos.go.id. Ternyata anda desil 6 atau lebih. Artinya, tidak berhak

mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah.

Masalah desil ini sejak petugas Sensus Ekonomi mulai mendatangi rumah-rumah warga memang menjadi *hot topic* diskusi masyarakat. Sensus Ekonomi yang tak berkaitan dengan desil pun akhirnya menjadi kambing hitam. Bahkan, di beberapa daerah, warga mengusir petugas sensus.

Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan dari wakil rakyat di



Tidak sedikit masyarakat yang secara administratif berada di kategori desil 5 ke atas, tetapi pada praktiknya harus terengah-engah hanya untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan paling mendasar.

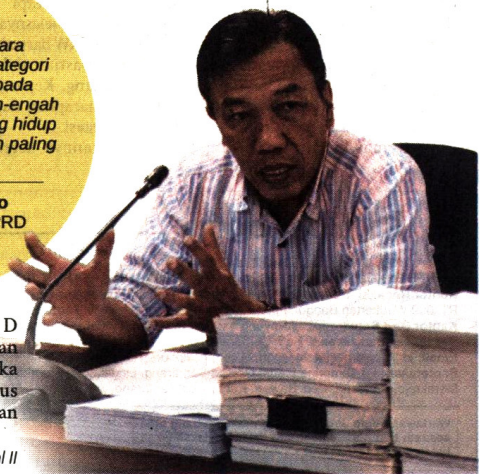
Tri Waluko Widodo
Anggota Komisi D DPRD
Kota Yogyakarta

DPRD

K o t a

Yogyakarta. Terutama Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat. Sejak bulan lalu, mereka terus memperjuangkan status desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

■ Baca SAAT... Hal II



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

Saat Warga “Terengah-engah” Menanti Keberpihakan

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Tidak sedikit masyarakat yang secara administratif berada di kategori desil 5 ke atas, tetapi pada praktiknya harus terengah-engah hanya untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan paling mendasar,” sesal Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo, kemarin (20/8).

Dodo, sapaan akrabnya menyuarakan, HUT Kemerdekaan 81 kali ini seharusnya menjadi momentum introspeksi, terutama pemerintah. Apakah sudah mampu menyejahterakan masyarakat? Atau malah mengambil kesejahteraan masyarakat lewat DTSN ini?

“Peringatan kemerdekaan

harus jadi momentum memperkuat keberpihakan. Jangan sampai keluarga yang sedang kesulitan malah kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial hanya karena terganjal batasan desil,” ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak di Kota Yogyakarta. Baik masyarakat, wakil rakyat, pejabat pemerintah untuk bisa menelurkan kebijakan sesuai kearifan lokal. Yakni, memberikan bantuan sosial baik pendidikan atau lainnya bagi kelompok rentan yang masuk kategori desil 5 ke atas.

“Komisi D terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah bisa benar-benar berpihak pada masyarakat yang

benar-benar membutuhkan. Misalnya untuk bidang pendidikan, program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) didorong agar bisa menyentuh desil 6. Bahkan dimungkinkan bagi desil 7 selama didukung fakta di lapangan,” katanya.

Pada sektor jaminan kesehatan, legislatif juga mendesak agar warga desil 5 keatas yang status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat bisa diaktifkan kembali oleh Pemkot lewat pembiayaan APBD. Masyarakat yang terdata bukan karyawan aktif menurutnya harus menjadi prioritas pengaktifan kembali.

Selain itu, Widodo juga

mendorong agar Pemkot bisa mengalokasikan honor bagi posyandu. Sebab mereka merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan warga.

“Sektor bantuan sosial, bantuan pemakaman yang semula fokus pada desil 1-2 agar meluas hingga desil 5 secara proporsional. Kebijakan ini mendesak mengingat tingginya biaya pemakaman dan makin terbatasnya lahan pemakaman di Kota Yogyakarta,” usulnya.

“Kami ingin kemerdekaan hadir dalam bentuk rasa aman. Warga tak boleh lagi cemas anak putus sekolah, bingung tak bisa berobat, atau kehilangan jaring pengaman sosial,” tegasnya. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005